

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 salah satu fokus dan indikator kinerja kunci dalam Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah aspek pelayanan penunjang yakni penanaman modal. Instansi Penanaman Modal yang mempunyai kontribusi paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan realisasi PMA adalah Instansi Penanaman Modal Kabupaten Solok Selatan dengan kontribusi 21,33%, sedangkan dilihat dari realisasi investasi PMDN Instansi Penanaman Modal yang mempunyai kontribusi paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah Instansi Penanaman Modal Kota Padang dengan kontribusi 36,28%.
2. Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan realisasi PMA secara sendiri-sendiri (*parsial*) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, ini berarti H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima. Hal ini menunjukkan kinerja Instansi Penanaman Modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat.
2. Hasil uji hipotesis menunjukkan realisasi PMDN secara sendiri-sendiri (*parsial*) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, ini berarti H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima. Hal ini menunjukkan kinerja Instansi

Penanaman Modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat.

5.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan dan hasil penelitian yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka menurut analisis peneliti untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Instansi Penanaman Modal Kabupaten/Kota diharapkan meningkatkan promosi potensi daerah sehingga mendorong PMA/PMDN berinvestasi.
2. Instansi Penanaman Modal diharapkan meningkatkan pelayanan kepada PMA/PMDN yang mengurus izin usahanya, dengan pelayanan yang baik maka perusahaan akan merasa nyaman dan mudah dalam berinvestasi.
3. Instansi Penanaman Modal Kabupaten/Kota diharapkan meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pemantauan, sehingga dapat mendorong baik PMA maupun PMDN menyampaikan LKPM sehingga realisasi investasi lebih terpantau, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat
4. Peningkatan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pusat dan Instansi Penanaman Modal Kabupaten/Kota melalui forum atau pertemuan sebagai wadah komunikasi sehingga pertukaran informasi dapat lebih mudah dan cepat, dengan demikian, diharapkan terjadi persamaan persepsi antara pusat dan daerah terhadap peraturan dan ketentuan penanaman modal yang berlaku. Terwujudnya persepsi yang sama mengenai peraturan

dan ketentuan penanaman modal yang berlaku dan kewenangan yang telah dilimpahkan ke daerah diharapkan dapat meningkatkan peranan dan tanggung jawab aparatur dalam memantau perusahaan-perusahaan PMA dan PMDN di wilayah pemantauannya

